

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

WALIKOTA MALANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia ;
 - b. bahwa dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu mempertimbangkan teknologi pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun ;
 - c. bahwa dengan perkembangan teknologi dapat dikurangi jumlah, bahaya dan/ atau daya racun limbah bahan berbahaya dan beracun, serta upaya perpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan memanfaatkan teknologi tersebut dapat pula berdampak positif terhadap pembangunan sektor ekonomi dan lingkungan ;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Revisi dan Evaluasi RTRW 2001 – 2011.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN .**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Kota Malang beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah .
3. Otonomi Daerah, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
4. Walikota, adalah Walikota Malang .
5. BAPEDALDA, adalah instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan di Kota Malang .
6. Kepala BAPEDALDA, adalah Kepala badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Kota Malang .
7. Limbah, adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi .
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain .
9. Pengelolaan limbah B3, adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut .
10. Penghasil limbah B3, adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 .
11. Reduksi Limbah B3, adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan .
12. Pengumpul limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 .
13. Pengangkut Limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan

Limbah B3 .

14. Pemanfaat Limbah B3, adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 .
15. Pengolah limbah B3, adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 .
16. Penimbun Limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 .
17. Pengawas, adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan Limbah B3 .
18. Penyimpanan, adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara .
19. Pengumpulan Limbah B3, adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 .
20. Pengangkutan Limbah B3, adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3 .
21. Pemanfaat Limbah B3, adalah suatu kegiatan perolehan kembali (Recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (Recycle) yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia .
22. Pengolahan limbah B3, adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun .
23. Penimbunan Limbah B3, adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup .
24. Orang, adalah orang per seorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum .

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas Lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali .

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media Lingkungan Hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu .

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya Limbah B3 .

Pasal 5

Pengelolaan Limbah Radio Aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B II

IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Pasal 6

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan/atau uji karakteristik dan/atau uji toksikologi .

Pasal 7

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik ;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik ;
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi .
- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .
- (3) Uji karakteristik Limbah B3 meliputi :
 - a. mudah meledak ;
 - b. mudah terbakar ;
 - c. bersifat reaktif ;
 - d. beracun ;
 - e. menyebabkan infeksi ; dan

- f. bersifat korosif .
- (4) Pengujian Toksikologi untuk menentukan sifat akut dan/atau kronik ;
 - (5) Daftar Limbah dengan kode Limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat dinyatakan Limbah B3 setelah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan/atau uji toksikologi .

Pasal 8

- (1) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak baik termasuk dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini, apabila terbukti memenuhi pasal 7 ayat (3) dan/atau ayat (4) maka Limbah tersebut merupakan Limbah B3 ;
- (2) Limbah B3 dari kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini dapat dikeluarkan dari daftar tersebut oleh instansi yang bertanggungjawab, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3 berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggungjawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis, Lembaga Penelitian terkait dan penghasil limbah ;
- (3) Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. Uji Karakteristik limbah B3;
 - b. Uji Toksikologi; dan atau
 - c. Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lain .
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh instansi yang bertanggungjawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian terkait .

B A B III

PELAKU PENGELOLAAN

Bagian Pertama Penghasil

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3 ;
- (2) Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat

memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3 ;

- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3 ;
- (4) Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 ;
- (5) Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan ;
- (6) Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab .

Pasal 10

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 ;
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala Instansi yang bertanggungjawab .

Pasal 11

- (1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3 ;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3 .
- (2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab ;

- (3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan ;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

Bagian Kedua Pengumpul

Pasal 12

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 .

Pasal 13

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3 ;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah , dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3 ;
 - c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan pengolah limbah B3 .
- (1) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab ;
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan ;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

Pasal 14

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3 ;
- (2) Pengumpul limbah B3 bertanggungjawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan .

Bagian Ketiga Pengangkut

Pasal 15

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 ;
- (2) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkan sendiri ;
- (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3 .

Pasal 16

- (1) Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3 ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung-jawab .

Pasal 17

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3 .

Bagian Keempat Pemanfaat

Pasal 18

Pemanfaat limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 .

Pasal 19

- (1) Pemanfaat limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai penghasil limbah B3 ;
- (2) Pemanfaat limbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengumpul limbah B3 ;

- (3) Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3 .

Pasal 20

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari .

Pasal 21

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :

- a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan ;
- b. jenis karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan ;
- c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan;
- d. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 .

Pasal 22

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab ;
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan ;
 - b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

Bagian Kelima Pengolah

Pasal 23

- (1) Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 ;
- (2) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang akan diolah paling lama 90 (sembilan puluh) hari ;
- (3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari .

Pasal 24

- (1) Pengolah limbah B3 wajib memuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. sumber limbah B3 yang diolah ;
 - b. jenis,karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah ;
 - c. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 .
- (2) Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab ;
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan ;
 - b. sebagai evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

Bagian Keenam Penimbun

Pasal 25

- (1) Penimbun limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 ;
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri .

Pasal 26

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. sumber limbah B3 yang ditimbun ;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun ;
 - c. nam pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 .
- (2) Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab ;
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada yat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan ;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

B A B IV
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Reduksi Limbah B3

Pasal 27

- (1) Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (house keeping) substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 lainnya ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai reduksi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung-jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua
Pengemasan

Pasal 28

- (1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketiga
Penyimpanan

Pasal 29

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan ;
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 91) wajib memenuhi syarat :
 - a. Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang ;
 - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keempat Pengumpulan

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhatikan karakteristik limbah B3 ;
 - b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi ;
 - c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan ;
 - d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 ;
 - e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kelima Pengangkutan

Pasal 31

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3 .

Pasal 32

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan limbah B3 meliputi perolehan kembali (recovery), penanggulangan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) ;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketujuh Pengolahan

Pasal 34

- (1) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi ;
- (2) Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan :
- a. Bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung ;
 - b. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, berdasarkan rencana tata ruang .
- (3) Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) ;
 - b. Melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (landfill) .
- (4) Pengolahan limbah B3 secara fisik dan/atau kimia yang menghasilkan :
- a. Limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi baku mutu limbah cair ;
 - b. Limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 .
- (5) Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan insenerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mempunyai insenerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang diolah ;
 - b. mempunyai insenerator yang dapat memenuhi efisiensi pembakaran minimal 99,99 % dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut :
 - 1) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polyorganic hydrocarbons* (POHCs) 99,99% ;
 - 2) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated biphenyl* (PCBs) 99,9999 % ;
 - 3) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated dibenzofurans* 99,9999 % ;
 - 4) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated dibenzo – p dioxins* 99,9999 % .

- c. memnuhi standar emisi udara ;
 - d. residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 35

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

Bagian Kedelapan Penimbunan

Pasal 36

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengangkut limbah bebas dari banjir ;
- b. Permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 cm per detik ;
- c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pembuangan limbah atau lokasi industri berdasarkan rencana penataan ruang ;
- d. merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil dan tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung ;
- e. tidak merupakan daerah resapan air tanah yang khususnya digunakan untuk air minum .

Pasal 37

- (1) Penimbunan limbah B3 wajib menggunakan sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 38

Penghentian kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

Pasal 39

- (1) Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal minimum 0,60 meter ;
 - b. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan limbah B3 ;
 - c. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3;
 - d. peruntukan lokasi penimbunan yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan :
 - a. Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki ijin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;
 - b. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki ijin pengangkutan dari Dinas Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung-jawab ;
 - c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki ijin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab .
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab, dan ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Instansi yang berwenang memberikan ijin ;

- (3) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh ijin operasi alat pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;
- (4) Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang telah disahkan oleh instansi berwenang ;
 - b. nama dan alamat badan usaha yang mohon izin ;
 - c. kegiatan yang dilakukan ;
 - d. lokasi tempat kegiatan ;
 - e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan ;
 - f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan ;
 - g. spesifikasi alat pengolah limbah B3 ;
 - h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan, diangkut atau diolah ;
 - i. tata letak saluran limbah, pengolah limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah ;
 - j. alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3 ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 41

- (1) Keputusan mengenai ijin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 wajib diumumkan kepada masyarakat ;
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketetapan Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

Pasal 42

- (1) Ijin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) dan pasal 36 .

Pasal 43

- (1) Untuk kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan bersama dengan permohonan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) kepada instansi yang bertanggung jawab ;
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

Pasal 44

- (1) Keputusan mengenai permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya ;
- (2) Syarat dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) .

Pasal 45

- (1) Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang lokasinya sama dengan kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintegasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan utamanya ;
- (2) Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan pemanfaat limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui yang diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab bersama dengan permohonan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ;

- (3) Keputusan mengenai permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui ;
- (4) Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 .

Pasal 46

- (1) Apabila penghasil dan/atau pemanfaat limbah B3 bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya berbeda dengan lokasi kegiatan utamanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam Peraturan Daerah ;
- (2) Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utamanya wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sedangkan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan utamanya wajib membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ;
- (3) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab dan persetujuan atas dokumen tersebut diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;
- (4) Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui wajib dicantumkan dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 .

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 ;

- (3) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- (4) Pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat dilaksanakan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

Pasal 48

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. memasuki areal lokasi penghasil, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3 ;
 - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium ;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 ;
 - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan .

Pasal 49

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) .

Pasal 50

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat melakukan penyidikan .

Pasal 51

- (1) Instansi yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Walikota dengan tembusan kepada Instansi terkait ;
- (2) Instansi yang bertanggung jawab mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3 .

Pasal 52

- (1) Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala ;
- (2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 ;
- (3) Uji kesehatan bagi poengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan tenaga kerja .

Bagian Ketiga Perpindahan Lintas Batas

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang melakukan import limbah B3 ;
- (2) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Kota Malang dengan tujuan transit, wajib memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Kota Malang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pemerintah negara penerima dan Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keempat Informasi dan pelaporan

Pasal 54

- (1) Setiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan limbah B3 ;
- (2) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada setiap orang secara terbuka .

Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 ;

- (2) Pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disampaikan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab atau Aparat Pemerintah Daerah terdekat ;
- (3) Aparat Pemerintah Daerah yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah diterimanya pelaporan .

Pasal 56

- (1) Instansi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 wajib segera menindak lanjuti laporan masyarakat ;
- (2) Proses tindak lanjut maupun hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada pelapor dan/atau masyarakat yang berkepentingan .

Pasal 57

Tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut oleh Walikota .

Bagian Kelima Penanggulangan dan pemulihan

Pasal 58

- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat , pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya ;
- (2) Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib memiliki sistim tanggap darurat ;
- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistim tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada masyarakat ;
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 ke lingkungan kepada Instansi yang bertanggung jawab dan/atau Walikota ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keenam
Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk skala yang bisa ditanggulangi oleh kegiatan penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun ;
- (2) Pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota maka Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota secara bersama-sama melakukan pengawasan ;
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga mencakup wilayah Pemerintah Kota dan Pemerintah sekitarnya pengawasannya dilakukan dengan secara bersama-sama oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota ;
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau pengumpul dan /atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga Pemerintah Kota tidak bisa mengawasi pengawasannya dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab bersama-sama dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi .

Pasal 60

- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib secara segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya ;
- (2) Apabila penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 yang bersangkutan melalui Walikota .

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 61

- (1) Segala biaya untuk memperoleh ijin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon ijin ;
- (2) Beban biaya permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perijinan ;
- (3) Untuk pemantauan atau pengawasan pengelolaan B3 yang dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B VI S A N K S I

Pasal 62

- (1) Instansi yang bertanggung jawab memberikan peringatan tertulis kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang melanggar ketentuan pasal ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17,pasal 18 , pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22,pasal 23, pasal 24 , pasal 25, pasal 26, pasal 28 pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36 ,pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 42, pasal 43, pasal 49, pasal 52 ayat (2) , pasal 58 dan pasal 60 ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak memenuhi atau tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya maka Kepala Instansi yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau mencabut sementara ijin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka ijin operasi dicabut ;
- (3) Walikota dapat menghentikan sementara kegiatan operasi atas nama instansi yang berwenang dan/atau instansi yang bertanggung jawab apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup ;

- (4) Kepala Insatansi yang bertanggungjawab wajib dengan segera mencabut Keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan sementara kegiatan operasinya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya .

Pasal 63

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 14, pasal 15, pasal 19, pasal 20, pasal 29, pasal 30, pasal 32, pasal 34, pasal 36, pasal 37, pasal 39 dan pasal 60 yang mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah dilakukan pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah B3 baik masing-masing atau bersama-sama secara proporsioanl wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun ;
- (2) Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan menimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan maka Instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara proporsional .

Pasal 65

Setiap orang atau Badan Usaha yang sudah melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib

meminta ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Oktober 2001

WALIKOTA MALANG

ttd

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 15/C

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG**

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

UMUM

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah. Diantara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya beracun (B3). Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin dengan mencegah masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Peran Pemerintah Indonesia dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut telah diratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.

Hirarki Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Bilamana masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3.

Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup kegiatan daur-ulang (recycling) perolehan kembali (recovery) dan penggunaan kembali (reuse) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan dilain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;
- c. Pengangkut Limbah B3;
- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3;
- f. Penimbun Limbah B3;

Dengan pengelolaan limbah sebagaimana tersebut di atas, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan ke

dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan sisa suatu kegiatan adalah suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan runtuhan, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain.

Angka 8

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak/ kadaluarsa, sisa bahan/ kemasan, tumpahan, sisa proses, oli bekas, oli kotor, limbah dari kegiatan pembersihan kapal dan tangki yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Tidak termasuk bagi limbah cair yang bersifat B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air serta limbah debu dan gas yang bersifat limbah B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara.

Angka 9 s/d angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Proses mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 dilakukan agar limbah tersebut menjadi tidak berbahaya dan atau beracun. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai, seperti stabilisasi dan solidifikasi, insinerasi, atau netralisasi.

Apabila teknologi tersebut tidak dapat diterapkan, maka harus digunakan teknologi terbaik yang tersedia yang dapat mengolah limbah tersebut seperti pertukaran ion dan membran sel serta teknologi-teknologi lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Angka 23 s/d angka 24

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan membuang limbah B3 langsung ke dalam tanah, air atau udara adalah pembuangan limbah B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu. Ketentuan ini dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berbahaya dan/ atau beracun lagi terhadap kesehatan manusia dan/ atau lingkungan hidup.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pengenceran adalah menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/ atau tingkat bahayanya turun, tetapi beban pencemarannya masih tetap sama dengan sebelum dilakukan pengenceran. Hal ini dilarang karena pengenceran tidak akan menghilangkan sifat berbahaya dan beracunnya limbah B3.

Pasal 5

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional yang merupakan instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan limbah radio aktif.

Pasal 6

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi limbah dari penghasil tersebut apakah termasuk limbah B3 atau tidak.

Mengidentifikasi limbah ini akan memudahkan pihak penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah atau penimbun dalam mengenali limbah B3 tersebut sedini mungkin.

Mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mencocokkan jenis limbah dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini, dan apabila cocok dengan daftar jenis limbah B3 tersebut, maka limbah tersebut termasuk limbah B3.
- b. Apabila tidak cocok dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini, maka diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik : mudah meledak dan / atau mudah terbakar, dan / atau beracun, dan / atau bersifat reaktif, dan / atau menyebabkan infeksi, dan / atau bersifat korosif.
- c. Apabila kedua tahapan tersebut sudah dilakukan dan tidak memenuhi ketentuan limbah B3, maka dilakukan adalah uji toksikologi.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a :

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

Huruf b :

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.

Huruf c :

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengujian karakteristik limbah dilakukan sebelum limbah tersebut mendapat perlakuan pengolahan. Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 apabila memenuhi salah satu atau lebih karakteristik limbah B3.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/ atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
- b. Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :
 - 1) Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24 % volume dan/ atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (140°F) akan menyala

apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg.

- 2) Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus.
 - 3) Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar.
 - 4) Merupakan limbah pengoksidasi.
- c. Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :
- 1) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.
 - 2) Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air.
 - 3) Limbah yang apabila dicampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dengan jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
 - 4) Merupakan limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
 - 5) Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standart (25°C, 760 mmHg).
 - 6) Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) pencemar organik dan anorganik dalam limbah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam lampiran II Pemerintah Daerah inidengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II Pemerintah Daerah ini, maka limbah tersebut merupakan limbah B3. Bila nilai Konsentrasi Zat pencemar lebih kecil dari nilai ambang batas zat pencemar tidak terdapat pada lampiran II Peraturan Daerah Ini maka dilakukan uji toksikologi.
- e. Limbah yang menyebabkan infeksi. Bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.
- f. Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut :
- 1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
 - 2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55°C.
 - 3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa

Ayat (4)

Penentuan sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respons antara limbah dengan kematian hewan uji, untuk menetapkan nilai LD50. Yang dimaksud dengan LD50 (Lethal Dose Fifty) adalah dosis limbah yang menghasilkan 50 % respons kematian pada populasi hewan uji. Nilai tersebut diperoleh dari analisis data secara grafis dan atau statistik terhadap hasil uji hayati tersebut.

Metodologi dan cara penentuan nilai LD50 ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Apabila nilai LD50 secara oral lebih besar dari 50 mg/kg berat badan, maka terhadap limbah yang mengandung salah satu zat pencemar pada lampiran III Peraturan Daerah ini dilakukan evaluasi sifat kronis.

Sifat kronis limbah (toksik, mutagenik, karsinogenik, teratogenik dan lain-lain) ditentukan dengan cara mencocokkan zat pencemar yang ada dalam limbah tersebut dengan lampiran III Peraturan Daerah ini. Apabila limbah tersebut mengandung salah satu dan atau lebih zat pencemar yang terdapat dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, maka limbah tersebut merupakan limbah B3 setelah mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini :

- 1.) Sifat racun alami yang dipaparkan oleh zat pencemar;
- 2.) Konsentrasi dari zat pencemar;
- 3.) Potensi bermigrasinya zat pencemar dari limbah ke lingkungan bilamana tidak dikelola dengan baik;
- 4.) Sifat persisten zat pencemar atau produk degradasi racun pada zat pencemar;
- 5.) Potensi dari zat pencemar atau turunan/degradasi produk senyawa toksik untuk berubah menjadi tidak berbahaya;
- 6.) Tingkat dimana zat pencemar atau produk degradasi zat pencemar terbiakumulasi di ekosistem;
- 7.) Jenis limbah yang tidak dikelola sesuai ketentuan yang ada yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 8.) Jumlah limbah yang dihasilkan pada satu tempat atau secara regional atau secara nasional berjumlah besar;
- 9.) Dampak kesehatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah yang mengandung zat pencemar pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan;
- 10.) Kebijakan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya atau program Peraturan Perundangan lainnya berdasarkan dampak pada kesehatan dan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau zat pencemarnya;
- 11.) Faktor-faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan merupakan limbah B3.

Metodologi untuk evaluasi Lampiran III Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian terkait.

Apabila setelah dilakukan uji penentuan toksisitas baik akut maupun kronis dan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka limbah tersebut dapat dinyatakan sebagai limbah non B3, dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pada prinsipnya penghasil tetap bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dihasilkannya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Konsekuensi dari prinsip bahwa jejak limbah B3 harus diikuti sejak dihasilkan sampai penimbunan akhir, maka penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan dan dikirimkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3, serta pengangkut yang melaksanakan pengangkutannya. Apabila pengangkutan dilakukan oleh penghasil sendiri, maka ketentuan mengenai catatan nama pengangkut tidak berlaku.

Apabila penghasil limbah B3 juga melakukan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, maka penghasil limbah B3 harus melaporkan pengelolaan limbah B3-nya.

Ayat (2)

Penyampaian catatan ini dimaksudkan agar jumlah limbah B3 dihasilkan oleh penghasil dapat dipantau oleh instansi yang bertanggung jawab.

Dengan diketahuinya jumlah limbah B3 yang dihasilkan, maka diketahui peta sumber limbah B3 yang menjadi dasar pengembangan kebijakan pengelolaan limbah B3.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13 s/d Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dokumen limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut berisi ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat penghasil atau pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3;
- b. Tanggal penyerahan limbah B3;
- c. Nama dan alamat pengangkut limbah B3;
- d. Tujuan pengangkutan limbah B3;
- e. Jenis, jumlah, komposisi dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan.

Dokumen limbah B3 dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) apabila pengangkutan hanya satu kali dan apabila pengangkutan lebih dari satu kali (antar moda), maka dokumen terdiri dari 11(sebelas) rangkap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lembar asli (pertama) disimpan oleh pengangkut limbah B3 setelah ditandatangani oleh pengirim limbah B3;
- b. Lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh pengangkut limbah B3, oleh pengirim limbah B3 dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab;
- c. Lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh pengangkut disimpan oleh pengirim limbah B3;
- d. Lembar keempat setelah ditandatangani oleh pengirim limbah B3 oleh pengangkut diserahkan kepada penerima limbah B3;
- e. Lembar kelima dikirimkan oleh penerima kepada instansi yang bertanggung jawab setelah ditandatangani oleh penerima limbah B3;
- f. Lembar keenam dikirim oleh pengangkut kepada Walikota dengan pengirim, setelah ditandatangani oleh penerima limbah B3;
- g. dengan pengirim, setelah ditandatangani oleh penerima limbah B3;
- h. Lembar ketujuh setelah ditanda tangani oleh penerima oleh pengangkut dikirimkan kepada pengirim limbah;

- i. Lembar kedelapan sampai dengan lembar kesebelas dikirim pengangkut kepada pengirim limbah B3 setelah ditandatangani oleh pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada pengangkut berikutnya/antar moda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17 s/d pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemasan adalah tempat / wadah untuk menyimpan, mengangkut dan mengumpulkan limbah B3. Simbol adalah gambar yang menyatakan karakteristik limbah B3. Label adalah tulisan yang menunjukkan antara lain karakteristik, jenis limbah B3

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang sesuai persyaratan adalah suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Misalnya limbah B3 yang reaktif (reduktor kuat) tidak dapat dicampur dengan asam mineral pengoksidasi karena dapat menimbulkan panas, gas beracun dan api.

Tempat penyimpanan sementara harus dapat menampung jumlah limbah B3 yang akan disimpan untuk sementara. Misalnya suatu kegiatan industri menghasilkan limbah B3, harus menyimpan limbah B3 ditempat penyimpanan sementara yang mempunyai kapasitas sesuai dengan kapasitas limbah B3 yang akan disimpan dan memenuhi persyaratan teknis, persyaratan kesehatan dan perlindungan lingkungan. Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30 s/d pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan efisiensi penghancuran dan penghilangan limbah B3 adalah "Destruction Removal Efficiency (DRE) ". Penentuan standar misi udara didasarkan pada standar emisi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi parameter konvensional (CO, NO, SO₂, Hidrokarbon, TSP, Amonia). Sedangkan penentuan standar emisi lainnya didasarkan karakteristik limbah B3, jenis insinerator, kualitas udara setempat dan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan persetujuan penghentian pengolahan adalah penghentian operasi (penutupan pengolahan) setelah diketahui lokasi tersebut tidak terkontaminasi.

Pasal 36

Untuk jenis-jenis limbah B3 yang LD50-nya lebih besar dari 50 mg/kg berat badan dapat dilakukan penimbunan pada lokasi dengan permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 cm per detik.

Apabila peruntukan lokasi penimbunan limbah B3 belum ditetapkan berdasarkan rencana penataan tata ruang, Instansi yang bertanggungjawab dapat mengajukannya kepada

Pasal 37

Ayat (1)

Penimbunan dalam ketentuan ini merupakan rangkaian kegiatan pengolahan. Penimbunan hasil pengolahan limbah B3 adalah tindakan membuang dengan cara penimbunan, dimana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir dari pengolahan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 tersebut.

Pelapis pelindung adalah lapisan yang dibangun untuk mencegah terpaparnya limbah B3 atau air lindi dari limbah B3 ke lingkungan, pelapis pelindung dapat berupa *synthetic liner* atau *compacted clay* atau lapisan lain yang setara yang memiliki permeabilitas yang sama.

Pelapisan pelindung dapat diberikan dengan *double liner* dan atau *satu liner* atau hanya dengan *compacted clay* sesuai dengan standar penimbunan limbah B3 yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan persetujuan penghentian penimbunan adalah penghentian operasi (penutupan penimbunan) setelah diketahui lokasi tersebut tidak terkontaminasi.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya adalah lokasi bekas penimbunan (post closure).

Yang dimaksud dengan fasilitas umum lainnya meliputi fasilitas olah raga, pendidikan, rumah sakit, rekreasi dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah suatu kegiatan pengolahan yang dilakukan pada suatu tempat yang sama dengan kegiatan usaha pokoknya.

Yang dimaksud dengan izin operasi alat pengolahan limbah B3 adalah ijin mengenai kelayakan pengoperasian peralatan pengolahan limbah B3, misalnya kelayakan dari insenerator antara lain efisiensi pembakaran 99,99 % menggunakan alat pengendalian pencemaran udara.

Ayat (4) s/d ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diketahui dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penentuan lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 harus mengikuti rencana tata ruang daerah dan persyaratan teknis.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Untuk kegiatan pengumpulan skala kecil misalnya minyak pelumas bekas, minyak kotor dan “slope oil” tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, melainkan membuat upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan.

Ayat (2) s/d ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44 s/d pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup merupakan bagian tidak terpisahkan dari ijin.

Pasal 47

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Tanda pengenal dan surat tugas ini penting untuk menghindari adanya petugas-petugas pengawas palsu, atau untuk menghindari agar tidak setiap pegawai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan melakukan pengawasan yang semestinya bukan wewenangnya.

Tanda pengenal memuat nama, nomor induk pegawai dan foto.

Surat tugas harus dengan jelas menyatakan nama pengawas yang ditugasi melakukan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Pengawas yang dimaksud adalah pejabat pengawas yang diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Pasal 51

Ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Uji kesehatan dimaksud dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setahun, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/ senyawa kimia limbah B3 terhadap pekerja.

Ayat (2) s/d ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Limbah dengan kode D220, D221, D222 dan D223 termasuk daftar limbah yang dilarang untuk diimport wilayah Negara Republik Indonesia.
Pelarangan ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan identifikasi limbah B3 dalam rangka pengawasan import limbah dan keterbatasan teknologi serta kapasitas pengelolaan limbah di Indonesia.

Ayat (2) s/d ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Ekport limbah B3 hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan tertulis dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam urusan limbah B3 di negara penerima dan negara penerima tersebut harus mempunyai fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3 yang layak sehingga pengolahan limbah B3 tersebut tidak menimbulkan resiko bahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
Adapun limbah B3 yang dimaksud sesuai dengan pasal 6,7,8 Peraturan Daerah ini dan daftar limbah B3 yang ditetapkan oleh konvensi Basel.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 54 s/d pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kecelakaan dalam ayat ini adalah lepas atau tumpahnya bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 ke lingkungan yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat untuk mencegah meluasnya dampak akibat tumpahan limbah B3 tersebut sehingga dapat dicegah meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta terganggunya kesehatan manusia.
Untuk mengatasi kecelakaan pengolahan limbah B3 diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan baik selama maupun setelah terjadinya kecelakaan.
Upaya ini harus dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu diantara instansi lintas sektor yang terkait.

Ayat (2)

Informasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menggunakannya untuk upaya penyelamatan diri jika terjadi kecelakaan dan turut serta dalam penanggulangan kecelakaan .

Yang dimaksud dengan sistim tanggap darurat adalah suatu sistim pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tumpah ke lingkungan dikategorikan sebagai limbah B3.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat ditanggulangi adalah jika tidak tersedianya sarana, prasarana dan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan, dan luas dampaknya sudah melintasi batas Kota Malang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dampak yang sangat besar adalah jika luas dampak dari kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 melintasi batas Kota Malang dan/atau daerah Propinsi dan/atau batas negara.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan dapat berupa yang disengaja antara lain, pengolahan atau penimbunan yang tidak sesuai dengan persyaratan lingkungan dan/atau kegiatan yang tidak disengaja antara lain lepasnya bahan kimia ke lingkungan akibat kebocoran tangki atau akibat kecelakaan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Studi kelayakan teknis tersebut antara lain untuk pembiayaan pengambilan sampel, analisis laboratorium, pemeriksaan kelayakan teknis serta publikasi.

Ayat (3) s/d ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 62 s/d pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara proporsional bersama-sama bertanggung jawab adalah bahwa masing-masing memikul tanggung jawab sesuai dengan kontribusinya dalam menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembersihan dan pemulihan lingkungan hidup dalam pasal ini mencakup antara lain studi untuk mengetahui luas dampak, jenis, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan hidup, serta pengolahan limbah B3 yang telah dibuang kedalam lingkungan hidup itu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas
